

**UPAYA BPBD MELAKUKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN BAGI KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB)
DALAM MENINGKATKAN MITIGASI BENCANA ALAM
DI KOTA PADANG PANJANG**

**BPBD's Efforts to Develop Institutional Capacity for Disaster
Preparedness Groups (KSB) in Enhancing Natural Disaster Mitigation
in Padang Panjang City**

Bunga Puja Adinda & Nora Eka Putri

Universitas Negeri Padang

bungapuja75@gmail.com; noraekaputri@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 20, 2025	Oct 10, 2025	Oct 22, 2025	Oct 27, 2025

Abstract

Padang Panjang City is a region vulnerable to natural disasters such as earthquakes, landslides, and floods, necessitating structured and sustainable mitigation efforts. In response, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) has established *Kelompok Siaga Bencana* (KSB, or Disaster Preparedness Groups) in each subdistrict as the frontline of disaster mitigation. However, the implementation of this program still faces various challenges, including disparities in KSB capacity, limited training, inadequate equipment and facilities, and weak inter-subdistrict coordination. This study aims to analyze BPBD's efforts in developing the institutional capacity of KSBs and to identify the supporting and inhibiting factors in enhancing disaster mitigation in Padang Panjang City. A qualitative descriptive method was used, employing purposive sampling to select key informants, including the Head of BPBD, the Head of the Prevention and

Preparedness Division, and KSB members. Data were collected through interviews and documentation and analyzed using the Miles & Huberman model: data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that BPBD has made reasonably good efforts to strengthen institutional capacity based on the three dimensions proposed by Deborah Eade: organizational, individual, and collaborative capacity. However, limited facilities and the absence of a city-level KSB coordination forum remain major obstacles. Key supporting factors include a well-defined institutional structure and high commitment among KSB members. This study offers practical implications through recommendations for improving training quality, strengthening logistics, and establishing an inter-subdistrict coordination forum. Theoretically, it contributes to the literature on risk management and institutional development in local-level disaster mitigation.

Keywords: Institutional Capacity; Disaster Mitigation; *Kelompok Siaga Bencana* (KSB); BPBD; Padang Panjang City

Abstrak: Kota Padang Panjang merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir, sehingga memerlukan upaya mitigasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Sebagai respons, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) di setiap kelurahan sebagai ujung tombak mitigasi bencana. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan kapasitas KSB, minimnya pelatihan, keterbatasan alat dan fasilitas, serta lemahnya koordinasi antar kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya BPBD dalam pengembangan kapasitas kelembagaan KSB, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mitigasi bencana di Kota Padang Panjang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan, yaitu Kepala BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta anggota KSB. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model Miles & Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah melakukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan secara cukup baik berdasarkan tiga dimensi menurut Deborah Eade, yaitu kapasitas organisasi, individu, dan kerja sama. Namun, keterbatasan fasilitas dan tidak adanya forum koordinasi KSB di tingkat kota menjadi hambatan utama. Faktor pendukung utama adalah struktur kelembagaan yang jelas dan tingginya komitmen anggota KSB. Penelitian ini memberikan implikasi praktis berupa rekomendasi peningkatan kualitas pelatihan, penguatan logistik, serta pembentukan forum koordinasi antarkelurahan. Secara teoretis, penelitian ini turut memperkaya literatur mengenai manajemen risiko dan pengembangan kelembagaan dalam mitigasi bencana di tingkat lokal.

Kata Kunci: Kapasitas Kelembagaan; Mitigasi Bencana; Kelompok Siaga Bencana (KSB); BPBD; Kota Padang Panjang.

PENDAHULUAN

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang dapat mengancam serta mengganggu kehidupan maupun penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti faktor alam dan manusia, sehingga berdampak pada timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan indeks risiko bencana berkategori tinggi dengan nilai 144,38, dengan berbagai ancaman bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi (Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2025. Kondisi ini menempatkan Kota Padang Panjang memiliki karakteristik geografis serta geologinya yang menghadapi risiko bencana alam yang signifikan, seperti tanah longsor, banjir serta gempa bumi (Harona & Alhadi, 2020).

Terdapat lima jenis bencana yang teridentifikasi pernah terjadi di Kota Padang Panjang berdasarkan sejarah kejadian, hal ini tercatat dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, seperti pada tabel 1 :

Tabel 1. Sejarah Kejadian Bencana di Kota Padang Panjang Tahun 2009-2024

Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal (Orang)	Luka-luka (Orang)	Hilang (Orang)	Menderita	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah rusak Ringan/ Terendam
Banjir	3	2	1	0	780	291	7	155
Cuaca Ekstrem	2	2	2	0	0	0	0	47
Gempa Bumi	2	0	22	0	0	0	17	577
Tanah Longsor	2	1	3	0	0	0	4	0
Kebakaran	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	9	5	28		780	291	28	779

Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2009-2024

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa Kota Padang Panjang merupakan kota yang rawan akan bencana banjir yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi paling besar di antara bencana lainnya. Berdasarkan temuan awal penulis dari hasil wawancara

bersama masyarakat yang terdampak banjir bandang yang terjadi pada tahun lalu, diketahui bahwa penyebaran informasi mengenai mitigasi bencana sudah dilakukan namun masih terbatas. Maka dari itu, Kota Padang Panjang perlu adanya strategi mitigasi yang aktif dan efektif guna mengurangi dampak yang terjadi kepada masyarakat.

Upaya mitigasi bencana merupakan sebuah pilar utama dalam mengurangi dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana, dengan membangun infrastruktur serta meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat (Haeril et al., 2021). Kewaspadaan yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi bencana dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri dan lingkungannya. Meskipun demikian, peningkatan kewaspadaan masyarakat tidak dapat hanya dicapai melalui sosialisasi dan edukasi semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, serta fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Peran dari pemerintah serta lembaga publik sangat penting untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi, terlihat dari berbagai aspek dan pencegahan bencana alam sebagai salah satu upaya mitigasi serta penanggulangan bencana alam (Dirga & Djafar, 2023). Hal tersebut dapat dilakukan melalui proses perencanaan dan kelembagaan yang tepat, penyediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, serta kapasitas adaptasi masyarakat lokal yang memadai (Amrullah, 2023). Lembaga terkait yang berwenang dalam peningkatan mitigasi bencana ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Padang Panjang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengkoordinir penanganan bencana di setiap daerah, dimulai dari tahap prabencana (pencegahan dan mitigasi), tanggap darurat, hingga pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). BPBD bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program-program mitigasi serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Salah satu bentuk upaya mitigasi bencana dengan melibatkan masyarakat yang dilakukan BPBD Kota Padang Panjang adalah pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB)

Kelompok Siaga Bencana (KSB) merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dibentuk secara formal di tingkat Kelurahan atau desa. Kelompok Siaga Bencana (KSB) sendiri dapat berperan aktif dalam pemetaan risiko bencana di tingkat

kelurahan, mengawasi perencanaan tata ruang yang berbasis mitigasi serta membantu dalam pemeliharaan infrastruktur tahan bencana. Pada prinsipnya, kinerja dari KSB sebagai organisasi perpanjangan tangan yang dibentuk BPBD dalam penanggulangan bencana harus senantiasa ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dengan tujuan memperbaiki permasalahan yang ada agar lebih maksimal (Cvetković et al., 2021). Namun pada kenyataannya, KSB dalam menjalankan perannya masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun pelatihan dan sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat indikasi bahwa pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana belum merata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informasi yang menjabat sebagai anggota KSB di Kota Padang Panjang, pelatihan untuk KSB di Kota Padang Panjang hanya dilakukan sekali setahun. Tidak ada program pembinaan yang teratur dan menyeluruh. Biasanya, hanya beberapa anggota yang ikut, sehingga banyak anggota lain tidak mendapatkan pelatihan yang cukup. Akibatnya, banyak anggota mungkin tidak siap menghadapi bencana. Selain itu, sumber daya masih kurang, alat pelindung diri dan perangkat komunikasi tidak cukup. Dana operasional dan insentif rutin juga belum ada. Pembagian peralatan antar kelurahan tidak merata. Selain itu, forum koordinasi KSB di tingkat kota belum resmi terbentuk. Kondisi ini, menyebabkan kesiapsiagaan KSB menurun, sehingga waktu tanggap dan proses evakuasi menjadi lebih lambat.

Agar tugas dan fungsi KSB terlaksana dengan baik, tentunya dibutuhkan pengembangan kapasitas kelembagaan yang dilakukan oleh BPBD terhadap KSB. Pengembangan kapasitas (*capacity building*) kelembagaan merupakan sebuah upaya rangkaian strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas serta daya tanggap terhadap kinerja suatu organisasi. Menurut Grindle, terdapat tiga dimensi dalam pengukuran kapasitas kelembagaan yaitu pengembangan sumber daya manusia, memperkuat organisasi serta reformasi kelembagaan (Basuki, 2020). BPBD perlu melakukan pengembangan maupun penguatan kapasitas kelembagaan agar kelompok masyarakat bisa memiliki kreatifitas serta inovasi dalam melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana dan bisa lebih membentuk masyarakat yang lebih siaga dalam mengantisipasi terjadinya bencana (Dirga & Djafar, 2023).

Kapasitas dalam mitigasi bencana mencakup kemampuan dalam mengelola bencana pada tahap sebelum bencana terjadi (prabencana), saat tanggap darurat, serta setelah bencana (pascabencana). Penelitian (Handayani et al., 2018), menyebutkan bahwa setelah dibentuknya

dan diberikan pengembangan kapasitas terhadap KSB di Kota Semarang, masyarakat lebih siap siaga akan bencana, dengan menerapkan beberapa strategi seperti simulasi bencana yang dilakukan secara berkala, serta integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang kota. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan KSB dalam meningkatkan mitigasi bencana alam di Kota Padang Panjang masih terbatas dan menghadapi berbagai tantangan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya, serta faktor pendukung dan faktor penghambat BPBD dalam melakukan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan bagi Kelompok Siaga Bencana dalam meningkatkan mitigasi bencana alam di Kota Padang Panjang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Panjang dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan bagi Kelompok Siaga Bencana (KSB) guna meningkatkan mitigasi bencana alam di wilayah tersebut secara deskriptif sesuai dengan keadaan dilapangan sebagaimana yang dijelaskan (Lexy J Moleong, 2019). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara sistematis usaha, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi BPBD dalam proses pengembangan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menghasilkan deskripsi faktual dan mendalam yang disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun presentasi lisan sebagai hasil analisis data lapangan yang diperoleh dari berbagai sumber.

Penelitian ini dilakukan sebulan yaitu 14 Agustus sampai 14 September 2025. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Kepala BPBD Kota Padang Panjang, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, serta anggota KSB Kota Padang Panjang. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi, arsip penelitian, jurnal, catatan lapangan, serta dokumen pribadi yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, sementara keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber untuk memastikan kebenaran informasi dari berbagai pihak. Analisis data dilakukan

menggunakan model (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020), yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan valid mengenai upaya BPBD dalam meningkatkan mitigasi bencana melalui penguatan kapasitas kelembagaan KSB.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Panjang memiliki peran strategis dalam melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan bagi Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana alam. Secara geografis, Kota Padang Panjang berada di dataran tinggi Bukit Barisan pada ketinggian 650–850 meter di atas permukaan laut dengan kondisi topografi berbukit dan bergelombang. Letak geografis tersebut menyebabkan wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana seperti tanah longsor, banjir bandang, dan gempa bumi, karena lokasinya berdekatan dengan Sesar Sumatera. Dalam konteks ini, keberadaan KSB menjadi elemen penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan mempercepat respons terhadap potensi bencana.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang Panjang, diperoleh informasi bahwa BPBD telah melakukan berbagai upaya dalam membina dan mengembangkan KSB di tingkat kelurahan. Upaya tersebut meliputi kegiatan pelatihan kesiapsiagaan bencana, simulasi tanggap darurat, pembentukan struktur organisasi KSB, serta pendampingan langsung di lapangan. BPBD juga berperan sebagai fasilitator dan koordinator lintas kelembagaan dalam memberikan edukasi dan penguatan kapasitas anggota KSB agar mampu melakukan tindakan mitigasi dan evakuasi mandiri pada saat terjadi bencana. Namun, menurut hasil wawancara dengan beberapa anggota KSB, frekuensi pelatihan yang diberikan masih terbatas dan belum dilakukan secara rutin setiap tahun. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pembaruan keterampilan dan pengetahuan anggota dalam menghadapi kondisi darurat.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan anggota KSB Kelurahan Gantiang dan Koto Panjang, ditemukan bahwa permasalahan lain terletak pada sistem rekrutmen dan status keanggotaan yang belum memiliki kejelasan secara administratif. Banyak anggota yang bersifat sukarela tanpa kejelasan masa jabatan atau insentif tetap, sehingga memengaruhi

keberlanjutan dan konsistensi partisipasi mereka dalam setiap kegiatan. Salah satu anggota KSB menyampaikan bahwa

“Kami sering dipanggil kalau ada pelatihan atau bencana, tapi belum ada kejelasan siapa yang aktif tetap dan siapa yang cadangan. Kadang yang aktif di awal, sekarang tidak lagi hadir.”

Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem keanggotaan dan evaluasi rutin agar koordinasi dan kesiapan KSB tetap terjaga.

Dari sisi kelembagaan dan struktur organisasi, BPBD telah menetapkan pedoman yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antaranggota KSB. Struktur ini telah membantu dalam memperlancar koordinasi ketika terjadi bencana. Namun, menurut hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kota Padang Panjang, perlu adanya forum resmi KSB tingkat kota sebagai wadah komunikasi, kolaborasi, dan evaluasi antar-KSB dari berbagai kelurahan. Forum ini diharapkan dapat memperkuat jejaring kerja dan mempercepat pertukaran informasi antarwilayah terdampak. Kepala BPBD menambahkan,

“Kami sudah membentuk KSB di beberapa kelurahan, tapi memang belum ada wadah resmi untuk menghimpun mereka di tingkat kota. Ini menjadi fokus kami ke depan agar koordinasi semakin baik.”

Selanjutnya, aspek pendanaan dan dukungan fasilitas juga menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan kapasitas kelembagaan KSB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesiapsiagaan, anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk kegiatan KSB masih sangat terbatas, sehingga pelatihan, simulasi, dan penyediaan peralatan siaga bencana belum bisa dilakukan secara maksimal. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, BPBD berinisiatif mendorong KSB agar aktif mencari dukungan dana dari CSR perusahaan, pokir DPRD, serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat. Salah satu anggota KSB mengungkapkan,

“Kami pernah mengajukan proposal ke beberapa perusahaan agar bisa membantu pengadaan rompi, helm, dan alat komunikasi. Ada yang respon, tapi belum semua.”



Gambar 1. Pelatihan yang diikuti oleh KSB Padang Panjang

Pada gambar 1 terlihat adanya bentuk pelatihan sebagai kerjasama dengan pihak-pihak lainnya yang searah dan sesuai untuk memajukan. Dimana pelatihan tersebut dilakukan dan wajib diikuti oleh KSB Padang Panjang. Begitupula di gambar berikut ini:



Gambar 2 Kerjasama Eksternal BPBD dengan Anggota DPRD dan BPBD Provinsi

Sumber: Instagram @bpbprovsumbar

Dimana pada gambar 2 diatas bahwa terlihat adanya kerjasama Eksternal BPBD dengan Anggota DPRD dan BPBD Provinsi yang bertujuan agar membentuk agar dapat mengembkan dan memajukan kelembagaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya BPBD Kota Padang Panjang dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan KSB sudah berjalan baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukungnya meliputi adanya komitmen dan dukungan

kelembagaan dari BPBD, semangat sukarela anggota KSB, serta koordinasi yang mulai terbangun dengan pihak kelurahan dan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambatnya mencakup keterbatasan anggaran, minimnya frekuensi pelatihan, ketidakjelasan keanggotaan, serta belum adanya wadah komunikasi resmi antar-KSB. Meskipun demikian, langkah-langkah strategis BPBD dalam memperkuat kapasitas kelembagaan KSB telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam di Kota Padang Panjang.

PEMBAHASAN

Upaya BPBD melakukan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan bagi Kelompok Siaga Bencana dalam Meningkatkan Mitigasi Bencana Alam di Kota Padang Panjang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Deborah eade dalam buku karya (Mutiarin & Zaenudin, 2021) yang menekankan tiga aspek penting, yaitu penguatan dimensi organisasi, pengembangan dimensi individu, dan dimensi kerja sama yang memberikan gambaran tentang seberapa baik BPBD Kota Padang Panjang telah membantu KSB dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan.

1. Dimensi Individu.

Pengembangan kapasitas kelembagaan sebuah organisasi akan dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan, jika sumber daya manusia atau individunya berkualitas. Dimensi individu berfokus pada peningkatan kapasitas anggota organisasi yang menjadi elemen kunci dalam suatu organisasi atau kelembagaan (Mutiarin & Zaenudin, 2021). Untuk mengevaluasi apakah dimensi ini telah berfungsi secara optimal di tingkat lembaga, penelitian ini membaginya menjadi dua indikator operasional yaitu pendidikan dan pelatihan dan rekrutmen anggota KSB yang bersifat tetap dan mengikat (Jazuli et al., 2023).

Indikator pertama, yakni pendidikan dan pelatihan bagi relawan KSB di Kota Padang Panjang. Pendidikan dan pelatihan yang teratur dan berkelanjutan dapat membantu anggota organisasi meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Selain itu, anggota juga belajar tentang cara mengurangi dampak bencana dan menjalankan tugas mereka dengan lebih baik (Mutiarin & Zaenudin, 2021). Pendidikan dan pelatihan semestinya dilakukan secara berkelanjutan, untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan

masa depan (Mujtahid et al., 2025). Namun, frekuensi dari pelatihan anggota relawan KSP di Kota Padang Panjang hanya dilakukan satu kali dalam setahun dengan jumlah peserta pelatihan yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan anggota KSB tidak dapat kesempatan belajar yang sama, sehingga menyebabkan kapasitas antar anggota menjadi timpang. Sementara itu, materi pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan meliputi penanggulangan bencana gempa, pertolongan pertama, hingga pengenalan peralatan dasar dinilai cukup relevan dengan kondisi dilapangan.

Indikator selanjutnya dalam dimensi individu adalah rekrutmen anggota KSB yang bersifat tetap dan mengikat. Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia yang diperlukan dengan cara mencari, menemukan, serta menarik sumber daya manusia tersebut untuk dipekerjakan atau menduduki sebuah jabatan dalam organisasi maupun perusahaan (Khairul et al., 2019). Penelitian ini, peneliti menemukan persoalan dalam kejelasan status anggota KSB masih bersifat fleksibel yang sewaktu-waktu bisa berubah apabila ada anggota yang tidak aktif. Dalam (Shah et al., 2019) menekankan pentingnya keterlibatan anggota yang secara konsisten agar kesiapsiagaan masyarakat tetap terjaga.

Pengakuan formal terhadap keanggotaan KSP ditunjukkan dari SK Kelurahan dan penyediaan atribut resmi yang diberikan oleh BPBD. Atribut ini berupa rompi, topi, dan tanda pengenal yang berfungsi sebagai identitas relawan sekaligus simbol pengakuan dalam melaksanakan tugas kebencanaan. Keberadaan atribut menegaskan bahwa meskipun status keanggotaan KSB masih bersifat relawan dan fleksibel, namun upaya penguatan kapasitas kelembagaan tetap dilakukan melalui pemberian identitas kelembagaan yang jelas (Ratnasari et al., 2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya BPBD Kota Padang Panjang sudah terlihat, yaitu melalui pelatihan dan bimbingan teknis, pemberian SK kepada anggota KSB, serta perlengkapan atribut resmi. Namun, terdapat beberapa hal yang membuat upaya tersebut menjadi tidak optimal, seperti keterbatasan intensitas pelatihan, ketidakmerataan peserta, serta status keanggotaan yang belum permanen. Ini tentunya menjadi hambatan utama dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, yang artinya peningkatan kapasitas individu perlu diikuti dengan sistem rekrutmen yang jelas dan pelatihan yang lebih menyeluruh agar dapat memperkuat kelembagaan KSB secara menyeluruh.

2. Dimensi Organisasi.

Dukungan struktur organisasi termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi suatu organisasi. Dukungan struktur organisasi dapat mempermudah pembagian kinerja dari setiap individu, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil peneliti, ditemukan bahwa pembagian struktur dari masing-masing sumber daya manusia dalam pengembangan kapasitas kelembagaan sudah ada (Mutiarin & Zaenudin, 2021). Struktur BPBD Kota Padang Panjang telah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung koordinasi dengan KSB. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, menyatakan bahwa BPBD (khususnya Bidang PK) berperan langsung dalam membina, mengkoordinasikan, dan mengarahkan KSB di tingkat Kelurahan. Dengan demikian terlihat adanya kesinambungan struktural antara BPBD dengan KSB.

Selain dukungan struktur organisasi, selanjutnya yaitu ketersediaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara BPBD mengakui bahwa dana yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan KSB, baik dalam pelatihan rutin, peralatan khusus, maupun sarana pendukung. BPBD melakukan kerjasama eksternal seperti melalui aspirasi DPRD (Dana Pokir) sebagai upaya strategis untuk mengatasi keterbatasan dalam anggaran. Upaya ini memberikan ruang kreativitas bagi KSB, tetapi juga menunjukkan bahwa keberlangsungan program masih bergantung pada dukungan eksternal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh (Ernawati et al., 2021), bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan akan lebih efektif apabila bisa dicapai dengan strategi internal yang kuat dan optimalisasi sumber daya lokal.

Indikator selanjutnya dalam dimensi organisasi adalah sarana dan prasarana dalam upaya bpbd melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan bagi KSB dalam meningkatkan mitigasi bencana alam. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa belum maksimal dalam pengembangan kapasitas KSB dalam meningkatkan mitigasi bencana alam. Wawancara yang dilakukan Bersama Kabid PK, Staf BPBD, serta Ketua KSB Silaing bawah dan Koto Panjang, mendapatkan bahwa mereka telah melakukan upaya penyaluran alat sarana dan prasarana seperti APD, cangkul, gerobak, parang dan alat sederhana dalam penanggulangan bencana. Namun, peralatan ini masih terbatas, dan belum bisa dilengkapi untuk keseluruhan anggota KSB. sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaan bagi anggota KSB. Dapat disimpulkan bahwa upaya BPBD melakukan pengembangan kapasitas

kelembagaan bagi KSB dalam meningkatkan mitigasi bencana alam jika dilihat dari dimensi individu, sudah ada namun masih terdapat beberapa kendala dukungan struktur yang sudah mulai menguat namun masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum lengkap. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya yang BPBD lakukan sudah berjalan namun masih membutuhkan penguatan lebih lanjut terutama dalam aspek finansial dan peralatan (Mutiarin & Zaenudin, 2021).

3. Dimensi Kerjasama

Dimensi Kerjasama menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, dengan adanya KSB tidak bisa berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pihak internal maupun eksternal. Menurut Deborah Eade, Kerjasama merupakan Kegiatan organisasi yang berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal dari organisasi tersebut (Mutiarin & Zaenudin, 2021). Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa BPBD Kota Padang Panjang bekerja sama dengan Anggota DPRD dalam pengadaan alat-alat untuk kesiapsiagaan bencana melalui dana pikir. Selain itu, dalam pelatihan BPBD Kota Padang bekerja sama dengan Tagana dari Dinas Sosial, PMI serta aparat TNI/Polri, meskipun sifatnya masih insidental. Materi yang diberikan pun bervariasi dan sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti mendirikan bivak maupun penanganan bencana darurat. Namun, kerjasama BPBD dengan dengan pihak swasta maupun akademisi belum banyak dilakukan. Artinya, kolaborasi dengan pihak eksternal masih terbatas pada sektor pemerintahan dan belum melibatkan aktor lain secara luas.

Penelitian (Afrida, 2017) mengungkapkan bahwa koordinasi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi yang lancar dan merata di antara semua pihak yang terlibat. Koordinasi merupakan proses pengarahan serta pengorganisasian komponen manajemen serta tugas-tugas anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Hasibuan SP, 2016). Koordinasi BPBD dengan anggota KSB sudah berjalan dengan baik. KSB melakukan koordinasi dengan BPBD dalam bentuk pelaporan, melalui media daring seperti WhatsApp grup, yang dilakukan per setiap kali ada bencana di masing-masing kelurahan, sehingga informasi kebencanaan yang diterima oleh BPBD cepat dan respons awal dapat segera dilakukan. Namun, forum koordinasi KSB tingkat kota yang seharusnya menjadi wadah normal untuk sinergi antar KSB belum terealisasi. Ketiadaan forum ini membuat pertukaran informasi dan pengalaman antar-KSB belum optimal. Oleh karena itu, pembentukan forum

koordinasi yang resmi dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sinergi antar KSB dalam upaya mitigasi bencana di tingkat kota.

Dengan demikian, dimensi kerjasama dalam pengembangan kapasitas kelembagaan KSB di Kota Padang panjang sudah menunjukkan langkah positif, terutama dalam komunikasi dan koordinasi internal. Kemudian, kolaborasi dengan pihak eksternal juga sudah berjalan dengan baik yaitu dengan melakukan kerjasama dengan anggota DPRD Sumbar dalam pengadaan alat-alat kesiapsiagaan serta dengan relawan lainnya seperti Tagana, dan lain-lain. Namun, masih terdapat kendala dalam koordinasi internal yaitu BPBD perlu mendorong adanya forum resmi antar-KSB serta menjalin kerjasama berkelanjutan dengan aktor non pemerintah dengan tujuan memperkuat kelembagaan secara komprehensif.

Faktor Pendukung dan Penghambat BPBD dalam melakukan Upaya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan bagi Kelompok Siaga Bencana dalam Meningkatkan Mitigasi Bencana Alam di Kota Padang Panjang.

Faktor pendukung yang pertama dalam pengembangan kapasitas kelembagaan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di Kota Padang Panjang adalah dukungan struktur organisasi yang jelas dari BPBD. Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kota Padang Panjang telah memberikan Surat Keputusan (SK) kepada masing-masing kelurahan yang membentuk KSB sebagai bentuk legalitas dan pengakuan struktural terhadap keberadaan kelompok tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahmah, 2019) yang menjelaskan bahwa struktur organisasi yang jelas dapat memperkuat koordinasi antaranggota dan meningkatkan keefektifan lembaga dalam menjalankan fungsinya. Dengan adanya SK resmi, KSB di Kota Padang Panjang memiliki legitimasi untuk menjalankan tugas dalam bidang kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta memudahkan dalam menjalin kerja sama lintas instansi. Selain itu, dukungan struktural ini juga memberikan arah dan tanggung jawab yang lebih jelas bagi setiap anggota dalam melaksanakan peran mereka di lapangan. Kejelasan struktur organisasi menjadikan KSB tidak hanya sebagai kelompok relawan biasa, tetapi juga bagian dari sistem resmi penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan BPBD.

Faktor pendukung kedua adalah komitmen bersama antara BPBD dan anggota KSB dalam menjalankan peran mitigasi bencana. Berdasarkan hasil wawancara, meskipun para anggota KSB tidak menerima honor tetap, mereka tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mereka aktif dalam pelatihan, sosialisasi, serta penanganan langsung

ketika bencana terjadi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih menjadi nilai yang kuat di masyarakat Padang Panjang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Rasjid et al., 2024) yang menemukan bahwa komitmen dan kesadaran sosial merupakan faktor penting dalam efektivitas lembaga berbasis masyarakat seperti KSB. Dengan demikian, motivasi yang dimiliki anggota KSB bukan hanya karena insentif finansial, tetapi juga karena dorongan moral dan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Komitmen bersama ini menjadi pondasi kuat dalam menjaga keberlangsungan program KSB di tengah keterbatasan sumber daya.

Namun demikian, pengembangan kapasitas kelembagaan KSB di Kota Padang Panjang masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan dana untuk menunjang penguatan kelembagaan dan pelatihan anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD, anggaran yang dialokasikan dari pemerintah daerah masih terbatas sehingga kegiatan pelatihan, simulasi bencana, dan penyediaan sarana prasarana dilakukan secara bertahap. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nurasa et al., 2025) yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan membutuhkan dukungan sumber daya finansial yang memadai agar kegiatan peningkatan kompetensi dapat berjalan berkelanjutan. Keterbatasan anggaran menyebabkan pelatihan bagi anggota KSB tidak merata dan tidak dilakukan secara periodik, sehingga sebagian anggota masih memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait mitigasi bencana. Kurangnya pelatihan juga berdampak pada lemahnya koordinasi dan kesiapan anggota dalam menghadapi bencana di lapangan.

Selain keterbatasan dana, faktor penghambat berikutnya adalah ketiadaan forum koordinasi di tingkat kota yang menaungi seluruh KSB. Berdasarkan temuan penelitian, sampai saat ini Kota Padang Panjang belum memiliki wadah resmi bagi seluruh KSB untuk berkoordinasi dan berbagi pengalaman. Akibatnya, komunikasi antar-KSB dari berbagai kelurahan belum terjalin dengan baik dan setiap kelompok masih bekerja secara terpisah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Pangestu & Fedryansyah, 2023) di Sumedang yang menunjukkan bahwa pembentukan forum KSB di tingkat kabupaten dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan sinergi antaranggota, serta mempercepat penyebaran informasi terkait kesiapsiagaan bencana. Ketiadaan forum koordinasi di Padang Panjang menyebabkan kegiatan KSB belum terintegrasi secara optimal dalam satu sistem kelembagaan yang kuat. Padahal, forum seperti ini penting untuk mengembangkan kerja sama lintas wilayah dan memperkuat jaringan tanggap darurat secara terpadu.

Dari hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa ketiadaan forum koordinasi tidak hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga berdampak pada kelemahan mendasar dalam pengembangan kapasitas kelembagaan KSB. KSB yang bekerja tanpa wadah komunikasi terpusat berpotensi mengalami kesulitan dalam berbagi praktik terbaik, merencanakan kegiatan bersama, maupun mengakses sumber daya tambahan. Berdasarkan kajian BNPB berdasarkan (Admin, 2024) bahwa koordinasi antar-KSB merupakan elemen penting dalam strategi nasional pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, karena dapat memperkuat kapasitas lokal dalam menanggulangi bencana secara cepat dan efisien. Tanpa forum koordinasi, keberadaan KSB cenderung bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif masing-masing kelurahan. Maka dari itu sistem kelembagaan KSB di Padang Panjang dapat berkembang secara menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan (Alhadi et al., 2019).

Meskipun terdapat berbagai hambatan, secara keseluruhan upaya BPBD Kota Padang Panjang dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan KSB dapat dikatakan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. BPBD telah menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana di Daerah. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui alokasi dana yang lebih memadai, pelatihan yang berkelanjutan, serta pembentukan forum koordinasi resmi di tingkat kota. Hal ini mendukung penelitian lainnya seperti (Hilman et al., 2021) yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dalam mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat yang aktif. Dengan demikian, apabila hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi, maka BPBD dan KSB di Kota Padang Panjang akan mampu menjadi model sinergi kelembagaan yang tangguh dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai upaya BPDP melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan bagi KSB, dapat disimpulkan sudah cukup optimal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan mitigasi bencana alam bagi anggota KSB di Kota Padang Panjang dengan melihat dimensi yang ada. Dalam dimensi individu, BPBD telah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota KSB, meskipun frekuensi pelatihan belum merata serta partisipasi anggota dalam pelatihan tidak menyeluruh.

Selain, keanggotaan KSB meskipun bersifat relawan, namun sudah di SK oleh BPBD melalui Kelurahan. Selanjutnya dalam dimensi organisasi, upaya BPBD sudah cukup optimal melalui dukungan struktur, ketersediaan anggaran dan sarana dan prasarana. Terakhir, dalam dimensi kerjasama, BPBD telah melakukan jejaring kerjasama yang bersifat internal dan eksternal. Faktor pendukung dan penghambat BPBD dalam upaya pengembangan kapasitas meliputi, dukungan struktur yang jelas dan komitmen bersama anggota KSB. Sementara, faktor penghambat seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta ketiadaan forum koordinasi KSB di tingkat Kota.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko dan bencana, yang menguraikan bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan KSB pada dimensi individu, organisasi, dan Kerjasama dapat meningkatkan mitigasi bencana di Kota Padang Panjang. Temuan dalam penelitian ini menekan pentingnya mengidentifikasi langkah-langkah yang mempengaruhi keberhasilan intervensi BPBD, termasuk kendala seperti belum ada forum KSB kota dan keterbatasan fasilitas. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang, sehingga memungkinkan adanya penelitian yang lebih baik.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) memperluas cakupan kajian dengan membandingkan strategi pengembangan kapasitas kelembagaan KSB di beberapa daerah lain, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik terbaik (best practice) dalam penguatan kelembagaan berbasis masyarakat. Penelitian ke depan juga dapat menggunakan pendekatan mixed methods untuk menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat mengukur secara lebih akurat tingkat efektivitas pelatihan, kinerja kelembagaan, dan dampak nyata terhadap mitigasi bencana di lapangan. Selain itu, studi lanjutan juga dapat fokus pada analisis kebijakan pendanaan dan peran sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan program KSB, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi penguatan sistem penanggulangan bencana di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. (2024). *Menuju Sumbar Tangguh Bencana, Gubernur Mahyeldi Fokus Maksimalkan Mitigasi dan Meminimalisir Dampak*. Biroadpim.Sumbarprov. <https://biroadpim.sumbarprov.go.id/home/news/612-menuju-sumbar-tangguh-bencana-gubernur-mahyeldi-fokus-maksimalkan-mitigasi-dan-minimalisir-dampak>

- Afrida, Y. (2017). Tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gempa bumi di Kota Padang Panjang. *Jurnal Buana*, 1(1), 114. <https://doi.org/10.24036/buana.v1i1.52>
- Alhadi, Z., Syarief, A., & Nurhabibie, P. (2019). Penguatan Kapasitas Kelompok Siaga Bencana (Ksb) Kelurahan Ulak Karang Selatan Kota Padang. *Jurnal Penerapan IPTEKS*, 1(1), 76. <http://jipteks.ppj.unp.ac.id/index.php/ipteks/article/view/30>
- Amrullah, S. (2023). Challenges of Local Disaster Management Agencies (BPBD) in Realizing Inclusive Disaster Management in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 447, 06001. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344706001>
- Basuki, I. (2020). *Mitigasi Struktural Bencana Pada Infrastruktur Sistem Transportasi*. Ress Press.
- Cvetković, V. M., Tanasić, J., Ocal, A., Kešetović, Ž., Nikolić, N., & Dragašević, A. (2021). Capacity Development of Local Self-Governments for Disaster Risk Management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19), 10406. <https://doi.org/10.3390/ijerph181910406>
- Dirga, A. S., & Djafar, T. (2023). Implementasi Penanggulangan Bencana Studi Kasus Nagari Siaga Bencana (Nagasina) Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 3(2), 106. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/3777>
- Ernawati, R., Dirdjo, M. M., & Wahyuni, M. (2021). Peningkatan pengetahuan siswa terhadap mitigasi bencana di SD Muhammadiyah 4 Samarinda. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(2), 393. <https://www.jceh.org/index.php/JCEH/article/view/258>
- Haeril, H., Mas'ud, M., Iradat, T., & Hendra, H. (2021). Penerapan Kebijakan Mitigasi Bencana (Fisik dan Nonfisik) dalam Mengurangi Risiko Bencana di Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(1), 23–47. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i1.179>
- Handayani, W., Yesiana, R., & Anggraini, M. (2018). Pembentukan Dan Penguatan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Sebagai Wujud Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Banjir Di Kanal Banjir Barat Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 12(1), 113. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v12i1.21>
- Harona, R. S., & Alhadi, Z. (2020). Efektifitas Peran Bpbd Kota Padang Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Kelompok Siaga Bencana (Ksb). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(2), 309. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/278>
- Hasibuan SP, M. (2016). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Revisi). Bumi Aksara.
- Hilman, Y. A., Khoirurrosyidin, K., & Nasution, R. D. (2021). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa Tanggap Bencana. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 2(1), 204. <https://jabbb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/view/110>
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Khairul, K., Purnaweni, H., & Suwitri, S. (2019). Institutional capacity building for local disaster prevention board of West Pasaman Regency. *In IOP Conference Series: Earth*

and Environmental Science, 314(1), 3499. <https://doi.org/0.1088/1755-1315/314/1/012012>

- Lexy J Moleong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.
- Mujtahid, Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). Analisis Peran Komunitas Gubuk Inspirasi Dalam Membantu Mengembangkan Kualitas Pendidikan Dan Skill Pemuda Di Desa Sumberbrantas Kota Batu. *IDENTIK: Jurnal Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 2(4), 103–108. <https://sihojournal.com/index.php/identik/article/view/667>
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2021). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*. Pustaka Pelajar Offset.
- Nurasa, H., Puspita, D. P., Komara, S. R., Karlina, N., Pancasilawan, R., & Yusuf, F. N. (2025). Enhancing Organizational Capacity of Regional Disaster Management Agencies (BPBD) for Effective Disaster Response in Bandung Regency. *Journal of Ecobumanism*, 3(8). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5731>
- Pangestu, S. D., & Fedryansyah, M. (2023). Implementasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana Di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 192. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.47267>
- Rahmah, N. R. (2019). Struktur dan Desain Organisasi. *Jurnal Intizam*, 3(1), 219. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/intizam/article/view/52>
- Rasjid, A. R., Putri, D. S., Nona, N., Putri, C. T., Gatji, K., Amelia, P., Heriyanti, H., & Yinata, S. S. (2024). Pengembangan Sikap Positif Dalam Kesadaran Sosial Untuk Membangun Kohesi di Masyarakat. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i2.271>
- Ratnasari, J. D., Makmur, M., & Ribawanto, H. (2018). Pengembangan kapasitas (capacity building) kelembagaan pada badan kepegawaian daerah kabupaten jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 103. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap>
- Shah, A. A., Shaw, R., Ye, J., Abid, M., Amir, S. M., Kanak Pervez, A. K. M., & Naz, S. (2019). Current capacities, preparedness and needs of local institutions in dealing with disaster risk reduction in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 34(3), 165–172. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2018.11.014>